



LAPORAN KINERJA

2020



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja OPD Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Makassar, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

AMISON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/ IVb

NIP. 19701113 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Singkat Organisasi 2
1.2.1	Tugas dan Fungsi Organisasi 2
1.2.2	Struktur Organisasi 2
1.2.3	Isu – Isu Strategis 5
1.2.4	Sumber Daya Perangkat Daerah 6
1.2.5	Tantangan dan Peluang 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1	Rencana Strategis Tahun 2018-2023 11
2.1.1	Visi 11
2.1.2	Misi 12
2.1.3.	Tujuan dan Sasaran 13
2.1.4	Strategi dan Arah Kebijakan.....14
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) 15
2.3	Perjanjian Kinerja 16
2.4	Rencana Anggaran Tahun 2020 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1	Indikator Kinerja 18
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2020 19
3.3	Realisasi Anggaran 41
3.10	Instrumen Pendukung 43
3.10.1	Baruga Layanan Masyarakat44
3.10.2	Portal PPID 44
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	6
TABEL 1.2	Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	6
TABEL 1.3	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	7
TABEL 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	8
TABEL 2.1	Penjelasan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	12
TABEL 2.2	Tujuan dan Sasaran	13
TABEL 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	14
TABEL 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	15
TABEL 2.5	Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	16
TABEL 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
TABEL 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Sasaran 1		
TABEL 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	20
TABEL 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	21
TABEL 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	22
TABEL 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya	23
Sasaran 2		
TABEL 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	25
TABEL 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	25
TABEL 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	26
TABEL 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya	27
Sasaran 3		
TABEL 3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	28
TABEL 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	28
TABEL 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	29
TABEL 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumbar Daya	30

Sasaran 4

TABEL 3.14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	31
TABEL 3.15	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	31
TABEL 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	32
TABEL 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	33
TABEL 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
TABEL 3.19	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	26
TABEL 3.20	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020	42
TABEL 3.21	Analisis Efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur N0. 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Mei 2019. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan dinas.

1. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik.

1. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi.
2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan media Komunikasi publik.
3. Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi publik.

d. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis aplikasi dan Informatika.

1. Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrasstruktur jaringan.
2. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.

3. Seksi Pengelolaan Data dan *E-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan *e-government*.

e. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis statistik sektoral.

1. Seksi Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik ekonomi.
2. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sosial budaya.
3. Seksi Politik Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik Politik Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

f. Bidang Persandian

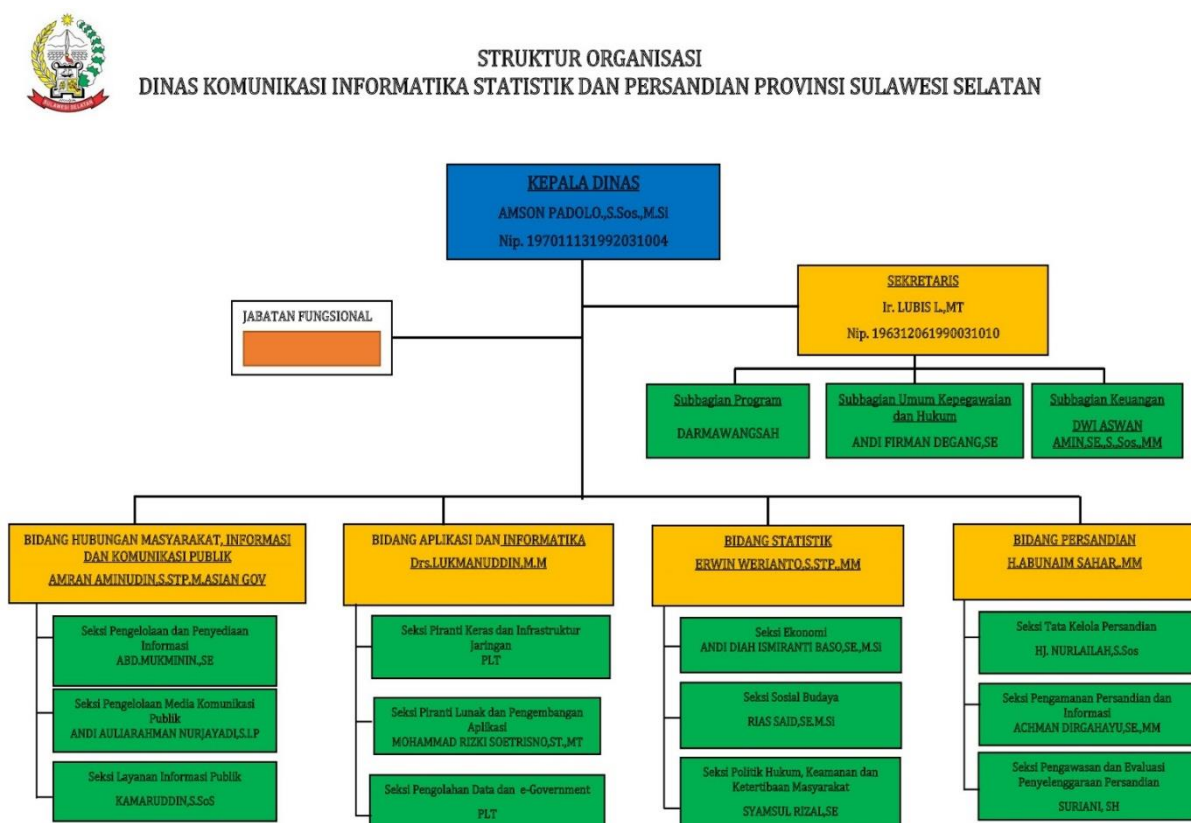
Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis persandian meliputi tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

1. Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola persandian
2. Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan persandian dan informasi.
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

g. Jabatan fungsional

1. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1



1.2.3 Isu – Isu Strategis

Keberhasilan suatu instansi bergantung pada bagaimana instansi itu sendiri merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-Isu Strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
- Keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Akses masyarakat terhadap informasi publik.

- Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Persandian
- Perkembangan teknologi informasi
- Program satu data indonesia

1.2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas. Jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebanyak 98 orang dengan tingkat Pendidikan bervariasi. Adapun Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN
1	SLTP	2 Orang
2	SLTA	13Orang
3	DIII/DIV	5 Orang
4	S1	58 Orang
5	S2	20 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didominasi oleh lulusan Sarjana S1 dan S2. Sedangkan tingkat kepangkatan dan golongan ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN Diskominfo SP
Prov. Sulsel**

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/d	-
2	IV/c	-
3	IV/b	7
4	IV/a	8
5	III/d	28
6	III/c	13
7	III/b	17
8	III/a	13
9	II/d	3
10	II/c	2
11	II/b	4
12	II/a	1
13	I/d	1
14	I/c	-
15	I/b	1
16	I/a	-

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	10	3	13
4	Sandiman	2	0	2
5	Pranata Humas	2	0	2
6	Arsiparis	1	4	5
7	Pelaksana	26	44	70
8	Total	47	51	98

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Saat ini aset-aset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam keadaan baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	Alat-Alat Angkutan	26	21	5
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	489	365	124
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	87	57	30
4	Bangunan Gedung	1	1	-
5	Jaringan	4	4	-
6	Buku Umum	50	50	-

Sumber : Data Aset Diskominfo SP

c. Keuangan

Dukungan dana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2020 berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan adanya nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami parsial. Selanjutnya kasus covid 19 yang melanda dunia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan akibatnya dilakukan Refocusing Anggaran sehingga mengalami beberapa kali parsial. Adapun rincian Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. DPA Pokok

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.927.115.535,00

Belanja Langsung : Rp. 8.719.020.133,15

Total : Rp. 20.646.135.668,15

2. DPA Parsial I

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.927.115.535,00

Belanja Langsung : Rp. 17.167.620.133,15

Total : Rp. 29.094.735.668,15

3. DPA Parsial II

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.927.115.535,00

Belanja Langsung : Rp. 16.967.604.133,15

Total : Rp. 28.894.719.668,15

4. DPA Parsial III

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.927.115.535,00

Belanja Langsung : Rp. 8.508.261.328,15

Total : Rp. 20.435.376.863,15

5. DPA Parsial IV

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.927.115.535,00

Belanja Langsung : Rp. 10.743.811.328,15

Total : Rp. 22.670.926.863,15

6. DPA Perubahan

Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.948.910.716,80

Belanja Langsung : Rp. 16.743.811.328,15

Total : Rp. 28.692.722.044,95

1.2.5 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dan diuraikan sebagai berikut.

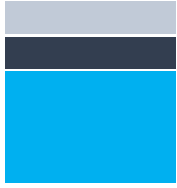
1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat
3. Penguatan peran PPID Utama dan PPID pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat nasional dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kebutuhan bandwidth terkait peningkatan kebutuhan akses sistem dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik.
6. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang berbasis layanan teknologi informasi dan telekomunikasi.

7. Belum terintegrasinya data statistik sektoral.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

b. Peluang

Selain tantangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga mempunyai peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara :

1. Telah Tersusunnya master Plan IT Prov.SulSel
2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan *e-Government*;
4. Terlaksananya Bimtek SPSE yang berkelanjutan;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPBE;
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik;
7. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
8. Pemanfaatan media massa, baik media cetak maupun elektronik dan online, untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dalam penanganan tindak kejahatan cyber (*cyber crime*);
10. Optimalisasi Big Data sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan;
11. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo SP dalam melaksanakan tugas



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai langkah perjalanan Rencana Strategis Organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di *Break Down* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mensinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

2.1.1 Visi

Visi misi Gubernur Sulawesi Selatan pada perencanaan periode 2018-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 tertuang visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

**“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif
dan Berkarakter”**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni, inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, “terkoneksi”, “mandiri dan sejahtera”, “sehat dan cerdas” serta “berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu:

Inovatif : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kompetitif : Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Inklusif : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan

Berkarakter : Spirit Pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

2.1.2 Misi

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Penjelasan dari setiap misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penjelasan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	Membangun Infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif

4	Mewujudkan kualitas Manusia yang kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses Pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah	Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Sumber : RPJMD Prov. Sulsel 2018-2023

Dari 5 (lima) misi Pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dijelaskan di atas, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif**.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Misi ke-1 Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif** selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
		Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel
			Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik
			Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi
			Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel
Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan		

	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Temuan Material

Sumber : Renstra Diskominfo SP 2018-2023

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dan kebijakan dari organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta mempermudah Akses Informasi Publik	Mewujudkan ketersediaan dan Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah
	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Standarisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Satu Data dalam Mendukung Perencanaan dan evaluasi pembangunan
	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Pembangunan dan Penerapan fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi	Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800.08/304/Diskominfo-SP tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan TIK}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$	Bidang Aptika
2.	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	Jumlah Layanan Media	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi Pemerintahan Yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi Pemerintahan}} \times 100\%$	Bidang Aptika
5.	Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	$\frac{\text{Jumlah OPD Terhubung Akses Internet}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$	Bidang Aptika
6.	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data OPD Yang Terkumpul}}{\text{Jumlah Data Seluruh OPD Yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Statistik
7.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI	Bidang Persandian

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengukur pencapaian masing-masing indikator di akhir Tahun Anggaran 2020. Hasil capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	HASIL CAPAIAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	65%	65%	Bidang Aptika
2.	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	42	42	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72,85	72,85	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	47%	47%	Bidang Aptika
5.	Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskomonfo SP Prov. Sulsel	96%	96%	Bidang Aptika
6.	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	70%	70%	Bidang Statistik
7.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	20%	20%	Bidang Persandian

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

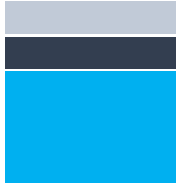
Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020 yaitu :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	42
		Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72,85
		Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	47%
		Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	96%
2	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	70%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	20%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	74
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%
		Persentase Temuan Material	0%

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020

Anggaran program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 yang bersumber Dari APBD Sebesar Rp 28.692.722.044,95. Terdiri Dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.948.910.716,80 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.743.811.328,15.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Renstra Tahun 2018 – 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Baik
2	76 % s.d 90%	Tinggi
3	66 % s.d 75%	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{*}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Pengukuran Kinerja mencakup antara lain :

- a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
- b) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengukur pencapaian masing-masing indikator di akhir Tahun Anggaran 2020. Hasil capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3.2 Capaian Kinerja Sasaran



Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel, Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, Persentase

OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel dilihat dari tabel Berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	42	42	100%
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72,85	72,85	100%
3.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	47%	47%	100%
4.	Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	96%	96%	100%
Rata – rata capaian kinerja				100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2020 tercapai 100% dengan kriteria sangat baik.

- Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel pada tahun 2020 tercapai sebanyak 42 Media yang terdiri dari 22 Media Elektronik (1 Media Nasional), 9 Media Cetak (2 Media Nasional), 7 Media Elektronik Televisi (3 Media Nasional) dan 4 Media Elektronik Radio.
- Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, pada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada 6 besar Kategori Cukup Informatif dengan nilai 72,85 dan memperoleh Piagam penghargaan.
- Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, pada implementasi e-government aplikasi pemerintah harus terpadu dan terintegrasi. Tahun 2020 aplikasi pemerintahan yang terintegrasi sebesar 47%, jumlah ini diperoleh dari 77 aplikasi pemerintahan terdapat 36 aplikasi yang telah terintegrasi. Dengan sistem aplikasi yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi.
- Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel, pada tahun 2020 tercapai 96% dari seluruh unit kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 51 OPD yang telah terhubung.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel, Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel dilihat dari tabel Berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR	2018	2019	2020
Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	34	36	42
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	-	71,55	72,85
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	20%	33%	47%
Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	70%	80%	96%

Indikator di atas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Pada Indikator Nilai keterbukaan pada tahun 2018 belum ada penilaian untuk Provinsi Sulawesi Selatan karena belum dilaksanakannya kegiatan PPID, pada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengikuti kompetisi dan masuk nominasi cukup informatif.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2020 Dengan Target Renstra dan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Target		
	2020	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	42	42	-
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72,85	72,85	-
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	47%	47%	-
Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	96%	96%	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator kinerja tahun 2020 menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun capaiannya mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Sasaran 1 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan indikator dan target melalui perencanaan program dan kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran pada tahun 2020 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran ‘**Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**’ masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu :

- Meningkatkan kerja sama dengan pihak media
- Meningkatkan peran PPID, utamanya PPID Pembantu pada Perangkat daerah dalam penyediaan informasi untuk mendukung keterbukaan informasi Provinsi Sulawesi Selatan
- Meningkatkan integrasi aplikasi pemerintah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Meningkatkan kapasitas bandwidth untuk akses internet Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 6 (enam) Program dengan anggaran sebesar Rp. 13,139,903,101.00 dengan realisasi sebesar Rp. 10,361,997,803.00 atau 78,86%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 21,14%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh keterlambatan pembayaran beberapa kegiatan yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2021, namun secara fisik telah terlaksana 100%.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	URAIAN	ANGGARAN TA. 2020	REALISASI	%
1.	Program Pengolahan Informasi Publik	1,086,345,400.00	1,048,307,200.00	96,50%
2.	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	477,156,676.00	473,200,000.00	99,17%
3.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass media	8,097,054,599.00	5.952,184,497.00	73,51%
4.	Program pengembangan dan Pemanfaatan Kehumasan Media Sosial	301,295,401.00	297,245,188.00	98,66%
5.	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government	3,072,951,025.00	2,488,469,025.00	80,98%
6.	Program Pengembangan Baruga Layanan Publik	105,100,000.00	102,591,893.00	97,61%
Jumlah		13,139,903,101.00	10,361,997,803.00	78,86%

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

1. Program Pengolahan Informasi Publik, dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan;
2. Program Pengelolaan Komunikasi Publik, dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, Program ini didukung 2 (dua) kegiatan;
3. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass media, dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan;
4. Program pengembangan dan Pemanfaatan Kehumasan Media Sosial, dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, Program ini didukung 1 (satu) kegiatan;
5. Program Pengembangan dan Implementasi E-Government, dilaksanakan oleh Bidang Aptika, Program ini didukung 2 (dua) kegiatan;
6. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik, dilaksanakan oleh Bidang Aptika, Program ini didukung 2 (dua) kegiatan.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan

Sasaran ini didukung oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator “Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan” dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	70%	70%	102,41%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan”, indikatornya Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tercapai 70% dengan kriteria Sangat Baik.

Untuk memperoleh ‘Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan’ dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{37}{53} \times 100 = 70 \%$$

Berdasarkan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Statistik, maka Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2020 adalah sebesar 70% dan telah mencapai target.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-tahun sebelumnya

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	50%	60%	70%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan 3(tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra dan Standar Nasional

Perbandingan capaian Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2020 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Target		
	2020	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	70%	70%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan” melebihi dari target yang telah ditentukan pada Renstra yaitu 70%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah DiLakukan

Indikator pada Sasaran 2 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan indikator dan target melalui perencanaan program dan kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 2 tahun 2020 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran ‘**Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**’ masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu :

- Meningkatkan peran OPD dalam penyediaan data yang dibutuhkan

- Meningkatkan evaluasi dan monitoring data yang tersedia
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
- Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan data.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 234,116,400.00 dengan realisasi sebesar Rp. 231,056,400.00 atau 98,69%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,31%.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	234,116,400.00	231,056,400.00	98,69%

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

1. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral, dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel

Sasaran ini didukung oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Target dan Ralisasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	20%	20%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran 3 yaitu “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dengan realisasi capaian 100%, sehingga capaian kinerja sasaran ini tercapai dengan kriteria Sangat Baik. Untuk mengukur Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) menggunakan suatu aplikasi dengan tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009. Evaluasi dilaksanakan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2020 Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) memperoleh nilai 20%.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	-	10%	20%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 belum ada nilai karena belum dilakukan penilaian Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) tahun 2020 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Target		
	2020	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	20%	20%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Renstra yaitu 20%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah DiLakukan

Indikator pada Sasaran 3 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan indikator dan target melalui perencanaan program dan kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 3 tahun 2020 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran ‘**Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel**’ masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu :

- Meningkatkan tata Kelola keamanan informasi
- Meningkatkan pengelolaan resiko keamanan informasi
- Menyusun kerangka kerja keamanan informasi
- Meningkatkan pengelolaan aset informasi

- Meningkatkan teknologi dan keamanan informasi.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 120,253,600.00 dengan realisasi sebesar Rp. 118,113,500.00 atau 98,22%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,78%.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi	%
1.	Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi	120,253,600.00	118,113,500.00	98,22%

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

1. Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi, dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran ini didukung oleh Bagian Sekretariat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator Nilai Sakip OPD, Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah

Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dan Persentase Temuan Material dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Ralisasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip OPD	74	-	-
2	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%
4	Persentase Temuan Material	0%	0%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 4 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2020 tercapai 100% dengan kriteria sangat baik, namun untuk Indikator Sakip OPD belum ada realisasi karena belum adanya hasil evaluasi yang dilakukan untuk tahun 2020 .

a) Nilai Sakip OPD

Untuk memperoleh nilai SAKIP, yaitu melalui laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah tahun 2020 terhadap akuntabilitas kinerja untuk tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 700.04/4864/A.1/Itprov tanggal 08 Juni 2020 dengan nilai 73,11 atau kategori “BB”, yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Nilai Hasil Evaluasi

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,75
2	Pengukuran Kinerja	25	16,25
3	Pelaporan Kinerja	15	10,78
4	Evaluasi Internal	10	6,72

5	Capaian Kinerja	20	15,61
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,11
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sedangkan nilai SAKIP tahun 2020 untuk sementara belum diuraikan karena belum dilaksanakannya evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b) Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 28.692.722.044,95 dengan realisasi keuangan Rp 24.876.987.620,00 atau 86.70 % dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 11 Program dan 31 Kegiatan. Dengan realisasi fisik yang 100% berarti Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah juga mencapai 100%.

c) Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 rata rata capaian Prestasi Kinerjanya berkategori baik dan sangat baik dengan capaian 100%.

d) Persentase Temuan Material

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, temuan material berupa kelengkapan berkas administrasi. Namun seluruhnya telah ditindaklanjuti hasil temuan tersebut.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Nilai Sakip OPD	69,88	73,11	-
2.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	95%	100%	100%

4.	Persentase Temuan Material	0%	0%	0%
----	----------------------------	----	----	----

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator pada sasaran 4 mengalami peningkatan pada Nilai SAKIP OPD. Pada tahun 2018 memperoleh nilai dan tahun 2019 memperoleh nilai 73,11 dengan kategori BB.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Indikator sasaran tahun 2020 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2020	Target Jangka Renstra	Target Nasional
1.	Nilai Sakip OPD	-	74	-
2.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	-
3.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	-
4.	Persentase Temuan Material	0%	0%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator pada sasaran 4 sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator pada Sasaran 4 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 2 tahun 2020 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

tercapainya indikator sasaran 4 ini, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu :

- Membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas
- Meningkatkan evaluasi internal
- Menentukan target kegiatan dengan tepat
- Memberikan reward dan punishment
- Meningkatkan kualitas kinerja ASN
- Meningkatkan kualitas SDM ASN
- Meningkatkan tertib administrasi, tertib aturan dan tertib penggunaan Anggaran

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) Program dengan anggaran sebesar Rp. 3,249,538,227.15 dengan realisasi sebesar Rp. 3,051,509,712.00 atau 93,90%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 6,9%.

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,266,871,405.15	2,266,441,024.00	99,98%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	786,642,250.00	590,357,150.00	75,05%
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	196,024,572.00	194,711,538.00	99,33%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat program yang realisasi anggarannya sebesar Rp. 590,357,150.00 atau 75,05%, hal ini diakibatkan oleh adanya belanja kegiatan yang terlambat pembayarannya dan secara fisik telah dilaksanakan 100%.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan oleh Sekretariat, Program ini didukung 4 (empat) kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan oleh Sekretariat, Program ini didukung 4 (empat) kegiatan.
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dilaksanakan oleh Sekretariat, Program ini didukung 2 (dua) kegiatan.

Tabel 3.19
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1. Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel 2. Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik 3. Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi 4. Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang disediakan Diskominfo SP Prov. Sulsel	Program	INDIKATOR PROGRAM :		
			1. Program Pengembangan dan Implementasi e-Government	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah	70%	70%
			1. Kegiatan peningkatan akses internet Bandwith	- Jumlah Kapasitas bandwidth Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	600 MBps	600 MBps
			2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	- Jumlah aplikasi yang dibangun	14 Aplikasi	114 Aplikasi
			Program	INDIKATOR PROGRAM :		
			2. Pengembangan Baruga Layanan Publik	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %	100
			1. Kegiatan Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat	- Pengembangan Baruga Layanan Masyarakat secara elektronik	600 Aduan	341 Aduan
			2. Kegiatan Pengelolaan konten dan website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	- Jumlah konten dan Berita yang tersedia	1800 Konten / Berita	1.171 Konten / Berita
			Program	INDIKATOR PROGRAM :		
			3. Pengelolaan Informasi Publik	% Layanan Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Berkualitas Baik	80 %	80 %
1. Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	- Jumlah sengketa Informasi yang diselesaikan	60 Sengketa	117 Sengketa			

			2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID	- Jumlah Peserta Bimtek PPID	50 Peserta	50 Peserta
			3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik	- Jumlah data informasi Publik	500 Informasi Publik	500 Informasi Publik
			Program 4. Pengelolaan Komunikasi Publik	INDIKATOR PROGRAM : % Komunitas Masyarakat / Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	50 %	50 %
			1. Kegiatan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media	- Jumlah Mitra Media dalam pelaksanaan publikasi	2 Media	2 Media
			2. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	- Jumlah Laporan pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik	2 Laporan	2 Laporan
			Program 5. Kerjasama Informasi dengan Mass Media	INDIKATOR PROGRAM : Peningkatan Jumlah Kerjasama informasi aktif Media Massa	42	42
			1. Kegiatan Pelayanan Publikasi Kegiatan Pemprov Sulsel	- Jumlah Publikasi berita	8000 Berita	28.698 Berita
			2. Publikasi Media Nasional	- Jumlah kerjasama dengan media nasional	5 Media	1 Media
			3. Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak	- Jumlah Advetorial	50 Advetorial	65 Advetorial

			Program 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Kehumasan Media Nasional 1. Pengelolaan dan penyaringan informasi	INDIKATOR PROGRAM : Cakupan Teknologi informasi yang digunakan	100 %	100%
				Jumlah Media Sosial dan Website	5 Berita	6 Berita
2	Meningkanya Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Program 7. Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral 1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 2. Kegiatan Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD	INDIKATOR PROGRAM : % Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	53 % 50 %	53 % 50 %
				Jumlah Laporan hasil Penguatan Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan
				Jumlah Penyediaan data yang terstruktur	3 Laporan	3 Laporan
				Jumlah laporan data dan informasi Statistik Sektoral yang dilaporkan	3 Laporan	3 Laporan
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Program 8. Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi 1. Kegiatan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	INDIKATOR PROGRAM : % Komunikasi Daerah Yang Memanfaatkan Persandian	50%	50%
				- Jumlah Pelaksanaan penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya insiden keamanan Informasi	47 OPD	47 OPD
				- Jumlah peserta peningkatan kompetensi keamanan informasi dibidang penaggulan dan pemulihan	50 Orang	70 orang

			3. Kegiatan Penetapan pola hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jaringan komunikasi sandi	24 Kabupaten /kota	24 Kabupaten /kota		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip OPD 2. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 3. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 4. Persentase Temuan Material	Program 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan 3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	INDIKATOR PROGRAM : % Pemenuhan Administrasi Perkantoran	50 %	50 %		
				Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	40 orang	69 Orang		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	50 Jenis ATK	65 Jenis ATK		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	50 Jenis	50 Jenis		
				- Jumlah Perjalanan Dinas	32 Kali	46 Kali		
					Program 10 .Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Asrama 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan	INDIKATOR PROGRAM : % Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %
			- Jumlah Unit Gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	1 unit			
			- Jumlah Kendaraan Jabatan /dinas yang dipelihara	20 Unit	20 Unit			
			3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Jumlah perlengkapan dan Peralatan kantor yang tersedia	18 Unit	16 Unit		
			4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30 Unit	30 Unit		

			Program 11. Peningkatan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	INDIKATOR PROGRAM : % Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja tepat waktu	100 %	100 %
			1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 2. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Renstra pd yang disusun dan ditetapkan; jumlah dokumen RKA dan DPA baik pokok dan Perubahan yang tersusun; jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan ; jumlah Dokumen Evaluasi Pd yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen
				Jumlah Laporan administrasi Keuangan	15 Laporan	15 aporan

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta pencapaian target rencana kinerja juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu pada Anggaran pokok sebesar **Rp. 28.692.722.044,95**. Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 24.876.987.620,00** dengan persentase **86,70 %** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 3.815.734.424,95**. Uraian belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut.

Belanja Tidak Langsung :

a. Rencana Kerja Anggaran OPD

Besaran belanja tidak langsung pada Anggaran pokok Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 11.927.115.535,00** dan pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 11.948.910.716,80**.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 11.114.310.205,00** atau **93,02%**

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran pada Belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp. 834.600.511,80**.

Belanja Langsung :

a. Rencana Kerja Anggaran SKPD

Besaran belanja langsung pada anggaran pokok adalah sebesar **Rp. 8.719.020.133,15** dan mengalami beberapa kali parsial. Pada Parsial I **Rp. 17.167.620.133,15**, Parsial II **Rp. 16.967.604.133,15**, Parsial III **8.508.261.328,15**, Parsial IV **Rp. 10.743.811.328,15** dan Pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 16.743.811.328,15**.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp 13.762.677.415,00** atau **82,20 %**

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran pada Belanja langsung adalah sebesar **Rp. 2.981.133.913,15**.

Adanya sisa anggaran diakibatkan keterlambatan pembayaran Belanja Tidak Langsung yaitu TPP ASN Bulan Desember Tahun 2020 dan Belanja Langsung yang terdiri dari beberapa kegiatan yang secara fisik telah dilaksanakan dan akan dibayarkan pada Anggaran Tahun 2021. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	% REALISASI CAPAIAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel	13.139,904.101,00	10.361.997.803,00	78,85 %
2	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	234.116.400,00	231.056.400,00	98,69 %
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	120.253.600,00	118.113.500,00	98,22 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Temuan Material	3.249.538.227,15	3.051.509.712,00	93,90 %

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	100 %	78,85 %	21,15 %
		Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik			
		Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi			
		Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskomonfo SP Prov. Sulsel			
	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 %	98,69 %	1,31 %
	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	100 %	98,22 %	1,78 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	100 %	93,90 %	6,1 %
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik			
		Persentase Temuan Material			

3.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2020, digunakan instrument-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

3.4.1 Baruga Layanan Masyarakat

Baruga Layanan masyarakat merupakan layanan yang dihadirkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menampung saran maupun kritik ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui social media dan aplikasi baruga.

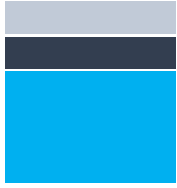
Manfaat dari Baruga Layanan Masyarakat ini yaitu mendapatkan informasi langsung dari Masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, menjadi wadah satu pintu terhadap laporan, keluhan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik.



3.4.2 Portal PPID

Portal PPID merupakan website yang menyediakan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik seperti permohonan informasi publik dan permohonan keberatan. Portal PPID dibuat sebagai wujud untuk peningkatan keterbukaan informasi public khusus di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.





BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan untuk target yang masih belum tercapai pada tahun ini perlu diantisipasi dan ditingkatkan pada tahun- tahun yang akan datang.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Analisis sasaran strategis perangkat daerah secara keseluruhan tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan bahwa seluruh realisasi sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mencapai target yaitu sebesar 100 % secara fisik dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu Sangat Baik.
2. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 24.876.987.620,00** dengan persentase **86,70% %**. Rendahnya persentase realisasi anggaran disebabkan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan, begitu juga dengan Tunjangan Penambahan Penghasilan TPP ASN bulan Desember tahun 2020.
3. Secara keseluruhan, pencapaian target pada tahun 2020 tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan seperti Refocusing Anggaran dan Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi.

4.2 Langkah -Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020 namun belum terbayarkan pada anggaran tahun 2021.

2. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerja sama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebaran informasi dan penerbitan / media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah dll) serta media luar ruang (Baliho, Spanduk dll)
3. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap triwulan.
5. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel, mempunyai integritas dan inovatif.
6. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara terus menerus.

